

Kebijakan Fiskal

Kuliah ke 13,10 Desember 2009

Erry Sukriah, MSE

Coba pikirkan??

- Seberapa jauh peran pemerintah dalam kehidupan sehari-hari.
- Seberapa 'perlu' keberadaan pemerintah dibanding dengan aktor lainnya (swasta)?
- Konsep mekanisme pasar dalam menjawab permasalahan ekonomi dasar.
- 'Kegagalan' pasar sebagai alasan utama perlunya intervensi (campur) tangan pemerintah dalam perekonomian.

Peran (Pengaruh) Pemerintah

- Sejak lahir: di RS pemerintah, oleh dokter yg disubsidi atau belajar di univ negeri, memperoleh sertifikat lahir dari pemerintah, dll.
- Sebagian (besar) belajar di sekolah negeri
- Sebagian (besar) adalah pegawai pemerintah
- Sebagian yg bekerja di sektor swasta pun banyak berinteraksi dan membutuhkan pemerintah
- Setiap dari kita bayar pajak (langsung/tidak)

→ *Jadi, setiap individu terpengaruh oleh aktivitas Pem.*

Landasan Filosofis Mekanisme Pasar

- Persaingan sempurna akan membuat alokasi resources yg efisien dlm perekonomian. Kondisi Pareto Optimum (dimana seseorang/pihak tidak akan bisa lebih sejahtera tanpa mengurangi kesejahteraan orang/pihak lain) akan tercapai.
- Tidak perlu intervensi pemerintah karena selama semua asumsi persaingan sempurna terpenuhi, akan ada *invisible hands* dari kekuatan pasar yg bekerja sedemikian rupa untuk mewujudkan kesejahteraan.

“Kegagalan Pasar”: Perlunya Campur Tangan Pemerintah

- Kegagalan Persaingan (adanya: Monopoli)
- Adanya Barang Publik
- Masalah Eksternalitas
- Kegagalan Informasi
- Pengangguran, Inflasi dan ketidakmerataan

Kebijakan Fiskal

- Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian
- Anggaran belanja negara terdiri dari penerimaan atas pajak, pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) dan transfer pemerintah (*government transfer*)

Kebijakan Fiskal

- Biaya transfer pemerintah merupakan pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang tidak menghasilkan balas jasa secara langsung. Contoh pemberian beasiswa kepada mahasiswa, bantuan bencana alam dan sebagainya.
- Salah satu pengaruh penerapan kebijakan fiskal adalah pada pendapatan nasional

Instrumen Kebijakan Fiskal

- Pengeluaran Pemerintah
- Pajak

→ Kedua instrumen ini terdapat dalam sebuah neraca yang disebut APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

Susunan dan Struktur APBN

- Struktur dan susunan APBN sejak tahun 1999 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena disusun berdasarkan prinsip anggaran tidak seimbang (anggaran defisit), di mana sumber penerimaan dan sumber pembiayaan dipisahkan dengan tegas pada pos-pos yang berbeda.
- Anggaran defisit lazim digunakan oleh negara yang mengacu pada government Financial Statistik (GFS), seperti Jepang. Dalam APBN sebelumnya, pos untuk menutup defisit berasal dari utang luar negeri (disebut : penerimaan pembangunan) yang dibukukan pada pos penerimaan. Dalam APBN tahun 1999, utang luar negeri dimasukkan pada pos : pembiayaan defisit.

Struktur APBN

- A. Pendapatan Negara dan Hibah
 - Penerimaan Pajak
 - Penerimaan Bukan Pajak
- B. Belanja Negara
 - Belanja Pemerintah Pusat
 - Anggaran Belanja untuk Daerah
- C. Keseimbangan Primer
- D. Surplus/Defisit Anggaran
- E. Pembiayaan

Struktur APBN

Sejak APBN 2000 saldo anggaran keseluruhan defisit dibiayai melalui:

a. Pembiayaan Dalam Negeri :

- Perbankan Dalam Negeri
- Non Perbankan Dalam Negeri

b. Pembiayaan Luar Negeri Bersih

- Penarikan pinjaman luar negeri (bruto)
- Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri

APBD

- APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah, DPRD.
- APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah

Struktur APBD

A. Pendapatan Daerah

- PAD (Pendapatan Asli Daerah) → pajak, retribusi,
- Dana Perimbangan → DAK, DAU
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah

B. Belanja Daerah

- Belanja Pegawai
- Belanja Subsidi

C. Pembiayaan Daerah

- Pinjaman
- Penerimaan Piutang